



Pengaruh Sistem Informasi e-PADI terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Sarah Vika Sabrina^{1*}, Vina Arnita²

¹⁻² Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Jl. Gatot Subroto Km. 4.5 Sei Sikambing, Medan

Email : sarahvika4221@gmail.com¹ vinaarnita@dosen.pancabudi.ac.id²

Abstract. *This study focuses on exploring the impact of the implementation of the e-PADI information system on the PBB-P2 payment process within the Deli Serdang District Revenue Agency. The background of this research is that PBB-P2 revenue collection is still below target. The method used is quantitative with an associative approach through surveys. The respondents in this study are taxpayers residing in Deli Serdang Regency. The sampling technique used is purposive sampling, namely those who have used the e-PADI application in their tax payment process. Data collection was conducted through questionnaires and documentation. The focus of data analysis was on how the e-PADI information system affects the completion of basic and education taxes in rural and urban areas. Based on the findings of this study, the use of the e-PADI information system has a positive impact on the completion of basic and education taxes in rural and urban areas. However, the utilization of this technology is still hindered by various constraints, such as technological limitations and low digital literacy among the community. The research data shows that the e-PADI information system has an impact on PBB-P2 payments, but improvements are still needed in terms of education, socialization, and the quality of digital services.*

Keywords: *e-PADI Information System, PBB-P2, Technology Acceptance Model (TAM), Tax Payment, Regional Revenue Agency (Bapenda) Deli Serdang Regency*

Abstrak. Studi ini difokuskan untuk menelusuri pengaruh dari penerapan Sistem informasi e-PADI terhadap proses pembayaran PBB-P2 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Latar belakang dari riset ini adalah karena pencapaian penerimaan PBB-P2 yang masih di bawah target. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan asosiatif melalui survei. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu mereka yang sudah menggunakan aplikasi e-PADI dalam proses pembayaran pajaknya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Fokus analisis data adalah bagaimana sistem informasi e-PADI memengaruhi penyelesaian beban dasar dan pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan temuan penelitian ini, penggunaan sistem informasi e-PADI berdampak positif pada penyelesaian beban dasar dan pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi ini masih terkendala oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi dan minimnya literasi digital di masyarakat. Data penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi e-PADI memberikan dampak terhadap pembayaran PBB-P2, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi edukasi, sosialisasi, dan kualitas layanan digital.

Kata kunci: Sistem Informasi e-PADI, PBB-P2, *Technology Acceptance Model (TAM)*, Pembayaran Pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang

1. LATAR BELAKANG

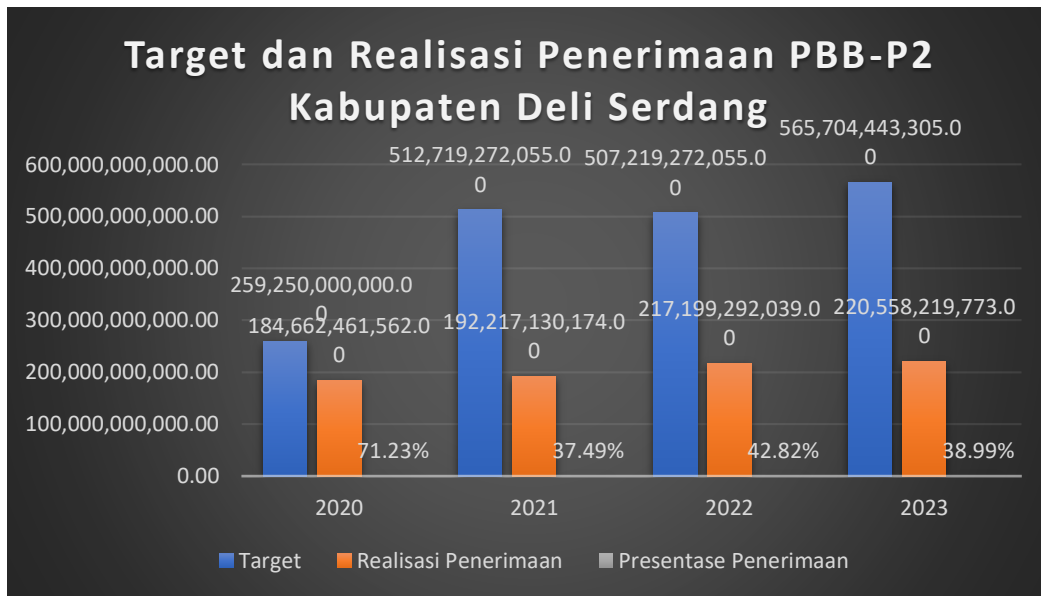
Pajak daerah merupakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah daerah yang menjadi sumber utama pemasukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting dalam meningkatkan PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sejak

dialihkan menjadi pajak daerah pada tahun 2014, PBB-P2 memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah, merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. PBB-P2 dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memberi kan manfaat sosial ekonomi bagi mereka yang memiliki hak atau manfaat yang timbul dari kepemilikan tanah dan bangunan tersebut (Nurdin, 2017:43).

Pembayaran pajak ditunjukan untuk menunjang proses pembangunan perkotaan dan pedesaan, yang dapat mendorong pengembangan infrastruktur. Pembayaran pajak kini telah berkembang melalui sejumlah teknik dan pilihan dengan perantara implementasi dan kelembagaan. Dikutip dari website <https://bapenda.deliserdangkab.go.id> saat ini di Kabupaten Deli Serdang H. Ashari Tambunan pada 6 september 2022, Kabupaten Deli Serdang menggunakan aplikasi e-PADI sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat guna, dan efisien, khususnya dalam hal pembayaran pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-PADI, Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Peneliti ini memfokuskan kajian pada pengaruh sistem informasi e-PADI terhadap pembayaran PBB-P2 Kabupaten Deli Serdang. Sistem informasi e-PADI merupakan inovasi digital yang diterapkan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan serta mendorong kepatuhan individu atau badan yang dikenai pajak. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan bagian dari komponen penting dalam pendapatan asli daerah, memiliki peran dalam pembiayaan pengembangan serta layanan kepada masyarakat.

Target penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang, fluktuasi sasaran dan pencapaian penerimaan PBB Kabupaten Deli Serdang tahun 2020-2023 tertera pada bagian berikut:



Grafik 1. Fluktuasi Target dan Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dari grafik diatas diperoleh mengenai realisasi penerimaan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Deli Serdang, terlihat adanya fluktuasi mengenai pencapaian target penerimaan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, sistem informasi e-PADI belum diterapkan, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 sistem ini mulai digunakan untuk mempermudah proses pembayaran pajak.

Tahun 2020, target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp.259,25 miliar, dengan realisasi mencapai Rp.184,66 miliar atau 71,23% dari target. Angka ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih cukup patuh dalam membayar PBB-P2, meskipun belum menggunakan sistem berbasis digital seperti e-PADI. Namun, kondisi berubah pada tahun 2021, dimana target penerimaan meningkat drastis menjadi Rp.512,71 miliar, tetapi realisasi yang diperoleh hanya mencapai Rp.192,21 miliar, dengan presentase penerimaan turun menjadi 37,49%. Faktor-faktor berikut merupakan penyebab paling mungkin dari penurunan ini seperti efek pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Memasuki tahun 2022, Badan Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang mulai menerapkan sistem informasi e-PADI untuk mempermudah pembayaran PBB-P2 secara online. Target penerimaan tahun ini sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu Rp.507,21 miliar, dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021, yakni sebesar Rp.217,19 miliar, dengan presentase penerimaan naik menjadi 42,82%. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari penerapan sistem informasi e-PADI dalam

meningkatkan jumlah penerimaan pajak, meskipun presentase pencapaian target masih tergolong rendah.

Pada tahun 2023, target penerimaan kembali mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp.565,70 miliar, namun realisasi penerimaan hanya mencapai Rp.220,56 miliar, dengan presentase penerimaan turun menjadi 38,99%. Meskipun nominal realisasi pajak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, presentase terhadap target juga mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun e-PADI sudah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan efektivitasnya.

Secara keseluruhan, penerapan e-PADI terbukti mampu meningkatkan jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan sebelum sistem ini digunakan. Namun, efektivitasnya dalam mencapai target Penerimaan pajak yang telah dihitung tersebut masih memerlukan analisis lebih lanjut. Diharapkan penerapan langkah fiskal di Kabupaten Deli Serdang akan lebih ideal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah di masa mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi yang lebih efektif guna mendorong kesadaran dan ketaatan pembayaran pajak, seperti dengan cara menyebarkan pemahaman kepada masyarakat yang lebih luas terkait dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya e-PADI.

Adapun tiga kecamatan yang menjadi penyumbang penerimaan PBB-P2 terbesar di Kabupaten Deli Serdang yaitu Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, dan Sunggal. Diambil dari dua tahun terakhir, Kecamatan Percut Sei Tuan tercatat sebagai wilayah penyumbang penerimaan PBB-P2 terbesar di Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak dari kecamatan ini mencapai lebih dari Rp.60 miliar, dan meningkat pada tahun 2021 menjadi lebih dari Rp.63 miliar. Kontribusinya terhadap total penerimaan PBB-P2 juga stabil, yaitu sebesar 32% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 402.468 jiwa dan sedikit meningkat menjadi 32,31% pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 405.334 jiwa.

Sementara pada Kecamatan Tanjung Morawa memberikan kontribusi yang cukup signifikan meskipun lebih rendah dari Percut Sei Tuan, yakni sekitar 17,26% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 223.450 jiwa, dan turun menjadi 15,41% pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 225.264 jiwa. Realisasi penerimaannya tercatat sekitar Rp.32 miliar pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi Rp.30 miliar pada tahun 2021.

Kecamatan Sunggal berada di posisi ketiga sebagai penyumbang penerimaan PBB-P2, dengan kontribusi sekitar 9,97% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sekitar 120.541 jiwa dan meningkat menjadi 10,33% pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 121.012 jiwa. Realisasi penerimaannya juga menunjukkan peningkatan dari Rp.18,7 miliar menjadi lebih dari Rp.20,3 miliar. Ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk

terpadat, menurut BPS Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan dalam Angka 2022. Banyaknya jumlah objek pajak PBB-P2 di wilayah tersebut tentu saja diindikasikan oleh tingginya jumlah penduduk.

Perbedaan dalam temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sistem informasi e-PADI terhadap pembayaran PBB-P2 di Deli Serdang, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan topik yang selama ini kurang mendapat perhatian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Model of Acceptance Technology (TAM) dan mengukur aksesibilitas, efisiensi temporal, dan kontribusi partisipan. Studi ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh mengenai efektivitas implementasi e-PADI dalam meningkatkan tingkat pembayaran PBB-P2. Khususnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang, judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Sistem Informasi e-PADI terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Technology Acceptance Model (TAM)

Menurut Cahya (2016), *Technology Acceptance Model (TAM)* juga menggambarkan pengaruh timbal balik antara gagasan pengguna tentang keuntungan dan kemudahan penggunaan sebuah sistem informasi dengan perilaku, kebutuhan, dan tujuan mereka. Karena *Technology Acceptance Model (TAM)* telah diterapkan secara luas oleh para pengakaji dan divalidasi dari beragam kondisi, latar belakang serta objek studi yang ditunjukan guna mempelajari pendekatan individu terhadap pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai model, maka TAM masih dianggap sebagai teori yang relevan dalam memprediksi keinginan dan kesiapan untuk mengadopsi suatu teknologi (Setiawa, 2017).

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dapat digunakan untuk meneliti bagaimana pendapat wajib pajak terhadap manfaat dan kegunaan sistem informasi e-PADI terhadap kepatuhan dan efisiensi pembayaran PBB-P2

Sistem Informasi Pajak Daerah (e-PADI)

e-PADI (Elektronik Pajak Daerah Terintegritas) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara online terutama PBB P2. Aplikasi ini diluncurkan pada 6 September 2022 oleh Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan, dengan maksud tujuan untuk

mempermudah subjek pajak dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pembayaran pajak dengan lebih mudah.

Fitur Utama e-PADI:

- **Pembayaran Pajak Online:** Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar berbagai jenis pajak daerah setiap saat dan dari mana saja tanpa perlu pergi ke bank atau kantor Bapenda.
- **Informasi Pajak Terpadu:** Fitur ini memudahkan wajib pajak untuk melacak tanggung jawab pembayaran pajak mereka dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang status dan riwayat pembayaran pajak.
- **Notifikasi dan Pengingat:** Fitur e-PADI membantu wajib pajak untuk tetap patuh dan mencegah denda keterlambatan dengan mengingatkan mereka tentang tenggat waktu pembayaran.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 37 dalam Undang-Undang PDRD “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali pada kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Karena PBB P2 sebelumnya di bawah kewenangan pemerintah pusat, maka PBB P2 menjadi sebuah lembaga baru yang berada dalam naungan pengelolaan pemerintah daerah. UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang bertujuan mendukung pembiayaan APBN yang secara resmi meratifikasi Undang-Undang Nomor 1 Januari 2010 dan memberikan semua kewenangan kepada Pemerintah Pusat, harus mulai berlaku pada tahun 2014 sesuai dengan Pasal 182 Ayat 1 Undang-Undang PDRD. Direncanakan pengalihan PBB P2 akan meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi risiko pajak daerah yang akan digunakan sebagai kontribusi terhadap anggaran belanja dan pendapatan negara.

Adapun hipotesis yang diajukan, yaitu:

H_0 : Sistem informasi e-PADI tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran PBB-P2

H_1 : Sistem Informasi e-PADI berpengaruh signifikan terhadap pembayaran PBB-P2

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut Sugiyono (2019:65), penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah yang bertujuan

untuk meneliti pengaruh atau keterkaitan antara beberapa variabel. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem informasi e-PADI terhadap pembayaran PBB baik di pedesaan maupun perkotaan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian asosiatif. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi titik tolak kajian ini.

Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara observasi di tempat penelitian dan diambil dengan wawancara, kemudian data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen, artikel ilmiah, publikasi resmi dari lembaga terkait seperti situs resmi <https://bapenda.deliserdangkab.go.id>, serta berita-berita yang relevan yang dipublikasikan secara daring. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui pencarian dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berkaitan dengan topik sistem informasi, e-PADI, Pembayaran PBB-P2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membawahi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Membantu Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah, merupakan tanggung jawab utama Bapenda Kabupaten Deli Serdang.

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Visi

Visi adalah suatu pandangan jangka panjang tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Bapenda Deli Serdang tetap menjadi yang terdepan dan tetap kreatif dalam menghadapi globalisasi. “Terwujudnya Institusi yang Profesional, Akuntabel, dan Transparan dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” adalah pernyataan misi Bapenda Deli Serdang. Pernyataan tersebut mewujudkan kondisi masa depan ideal yang dicitakan Bapenda Deli Serdang dengan merumuskan strategi perencanaan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mengagumkan.

Misi

- Misi organisasi adalah pernyataan luas tentang tujuan organisasi yang menjadi dasar bagi upaya organisasi untuk mewujudkan visinya (Robbins & Coulter, 2018, hlm. 262). Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan pajak daerah adalah tujuan Bapenda Serdang. Oleh karena itu, uang harus ditangani sesuai dengan hukum yang relevan, setiap hasil harus dinilai secara rutin, dan tujuan kinerja harus terus ditingkatkan.

- Dalam rangka mencapai PAD berbasis teknologi, tingkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk memastikan bahwa input, prosedur, dan output pekerjaan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka pekerjaan yang telah diselesaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dikontrol secara transparan.

Tujuan

Berikut ini adalah contoh-contoh sasaran, yang merupakan uraian yang mencakup pelaksanaan misi dan diantisipasi tergantung pada misi yang dijalankan:

- Misi Pertama
 - Membangun koordinasi antar lembaga.
 - Terbentuknya basis data pajak daerah yang akurat.
 - Menyediakan peralatan yang dapat diandalkan untuk pemungutan pajak daerah.
- Misi kedua adalah untuk:
 - Meningkatkan pendapatan pajak daerah; dan
 - Meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sumber-sumber non lokal.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Kedua uji ini dilakukan untuk menentukan apakah data lapangan benar-benar layak untuk diteliti atau tidak.

Uji Validitas

Pengujian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instrument pertanyaan tersebut valid. Apabila butir-butir dalam instrument mampu menggambarkan informasi yang ingin digali dari responden, maka instrument tersebut dinilai memiliki keabsahan. Teknik analisis yang diterapkan untuk menguji validitas dalam hal ini adalah metode korelasi Pearson Product Moment.

Tabel 1. Pengujian Valditas

Variabel	Instrumen	Corrected Item Pertanyaan total Correlation	<i>R tabel</i>	Ket
Sistem Informasi e-PADI (X1)	P1	0.311	0.279	Valid
	P2	0.547	0.279	Valid
	P3	0.524	0.279	Valid
	P4	0.343	0.279	Valid
	P5	0.313	0.279	Valid
	P6	0.327	0,279	Valid
	P7	0.408	0.279	Valid
	P8	0.349	0.279	Valid

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Y1)	P9	0.398	0.279	Valid
	P10	0.345	0.279	Valid
	P11	0.427	0.279	Valid
	P12	0.335	0.279	Valid
	P13	0.382	0.279	Valid
	P14	0.421	0.279	Valid
	P15	0.394	0.279	Valid
	P16	0.515	0.279	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS. 2025

Semua item pertanyaan pada variabel independen, Sistem Informasi e-PADI, yang meliputi P1 hingga P8, dan variabel dependen, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2, memiliki nilai Korelasi Total Item Terkoreksi yang lebih tinggi dari nilai *r tabel* sebesar 0,279, menurut hasil uji validitas yang ditunjukkan pada tabel 1. Akibatnya, setiap item pertanyaan dianggap sah.

Uji Reliabilitas

Tujuan dilakukannya uji reliabilitas adalah untuk menilai sejauh mana alat ukur (kuesioner) mampu menjadi representasi dari suatu konstruk penelitian. Ketika jawaban dari responden atas pertanyaan yang sama menunjukkan konsistensi dari waktu ke waktu, maka instrument tersebut dinilai memiliki Tingkat keandalan. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha pada konstruk tertentu melebihi angka 0,06.

Tabel 2. Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Role of Thumb</i>	Keterangan
Sistem Informasi e-PADI (X1)	0.640	0.6	Reliabel
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Y1)	0.640	0.6	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS. 2025

Setiap variabel dependen dan independent mendapat nilai Cronbach's Alpha senilai 0,640, yang lebih tinggi dari nilai referensi sebesar 0,6, menurut tabel 2. menunjukkan bahwa setiap item instrumen dapat dianggap dan dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukannya uji ini untuk melihat apakah data yang digunakan menyimpang dari asumsi tradisional atau tidak. Hasil dari keempat uji yang digunakan adalah:

Uji Normalitas

Tujuan dari uji ini untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan memiliki distribusi yang mendekati atau berbeda dari distribusi normal. Data yang sah yang digunakan dalam kajian adalah data yang memiliki distribusi normal.

Tabel 3. Pengujian Normalitas

<i>Kolmogorov-Sminove</i>	<i>Asymp. Sig</i>	Kriteria	Keterangan
0,085	0.200	>0.05	Berdistribusi Normal

Sumber: Data Olahan SPSS. 2025

Dari tabel tersebut, nilai yang dihasilkan pada *Asymp. Sig* sebesar 0.200. karena nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang sangat kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi. Keberadaan multikolinieritas dapat menyebabkan gangguan dalam proses estimasi koefisien regresi, seperti membuat nilai koefisien menjadi tidak stabil atau sulit ditafsirkan. Oleh karena itu, uji ini penting dilakukan agar hasil analisis regresi tetap akurat dan dapat dipercaya. Model persamaan regresi tidak memiliki gejala multikolinearitas jika $VIF < 10$ (Hair dkk. 2017).

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinieritas

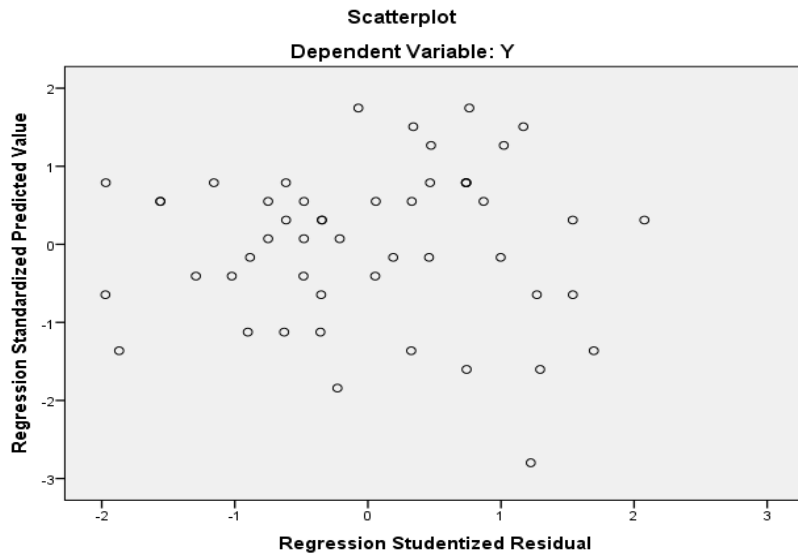
Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Sistem Informasi e-PADI	1.000	1.000	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Olahan SPSS> 2025

Dari hasil tabel 4, menunjukkan bahwa Sistem Informasi e-PADI memiliki nilai *tolerance* sebesar 1.000 dan nilai VIF sebesar 1.000. karena nilai *tolerance* > 0.10 dan $VIF < 10$, dapat dikatakan data tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berguna untuk menentukan apakah residual dalam model regresi menunjukkan varians yang tidak sama antara pengamatan. Ada sejumlah metode untuk menentukan apakah model regresi menunjukkan heteroskedastisitas, namun Uji Scatterplot digunakan dalam penyelidikan ini.



Gambar 1. Pengujian Heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan SPSS. 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan teknik Scatterplot, titik-titik residual tersebar secara acak dan tidak membentuk garis atau pola tertentu. Dengan begitu, dapat dikatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas dengan model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual dalam model regresi. Autokorelasi umumnya menjadi masalah dalam analisis regresi time series, namun dalam penelitian ini tetap diuji untuk memastikan bahwa model yang digunakan tidak mengandung autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Nilai *Durbin-Watson* berada dalam rentang 0 hingga 4.

Tabel 5. Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	123` R Square	Std. Error of the Estimate	<i>Durbin- Watson</i>
1	.487 ^a	.237	.221	3.75563	1.895

Sumber: Data Olahan SPSS. 2025

- Predictors: (Constant), Sistem informasi e-PADI
- Dependent Variabel: Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2

Nilai *Durbin-Watson*, yang diperoleh dari uji *Durbin-Watson* atau persamaan regresi residual, adalah 1.895. Sederhananya, jika nilai statistik uji *Durbin-Watson* kurang dari satu atau lebih dari tiga, residual atau galat model regresi tidak independen maupun berkorelasi otomatis. Dalam penelitian ini, autokorelasi tidak berisiko jika nilai titik statistik uji *Durbin-Watson* lebih dari satu atau kurang dari tiga (1.895). Autokorelasi tidak berisiko dalam

penelitian ini, menurut hasil uji Durbin-Watson, yang menunjukkan nilai $1.5849 < DW + = 1.895 < 2.4115$.

Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana berguna untuk melihat seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara persial. Berikut hasil uji regresi linear sederhana:

Tabel 6. Pengujian Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t hitung	Sig. (p-value)
Konstanta	12.438	4.485	2.774	0.008
Sistem informasi e-PADI	0.495	0.128	3.863	0.000

Sumber: Data Olahan SPSS. 2025

diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 12.438 + 0.496 X$$

Artinya, jika tidak ada pengaruh dari variable X (nilai $X = 0$), maka nilai Y adalah 12.438. Koefisien regresi variable X sebesar 0.496 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variable X akan meningkatkan nilai Y sebesar 0.496 satuan.

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung 3.863 dengan nilai signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$), maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk melakukan pembuktian hipotesis yang didasarkan pada penelitian yang sudah ada. Berikut hasil pengujian hipotesis:

Tabel 7. Pengujian Hipotesis

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Sistem informasi e-PADI	3.863	0.000	Signifikan
F hitung	14.923	R	0.487
F Sig.	0.000	R Square	0.237

Sumber: Data Olahan SPSS. 2025

Uji F

Tujuan dari pengujian ini untuk memastikan apakah sistem informasi e-PADI, variabel independen dalam keseluruhan model regresi, memiliki dampak substansial terhadap variabel dependen pembayaran PBB P2 pada saat yang sama. Temuan dari penyelidikan ini adalah

Nilai F yang dihitung, seperti yang ditunjukkan oleh tabel 7, adalah 14.923 dengan nilai signifikansi 0.000, yang kurang dari 0.05. Model regresi yang digunakan praktis dan secara signifikan memengaruhi variabel dependen.

Uji t

Bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu PBB-P2.

Hasil dari tabel 7 menunjukkan nilai t hitung sebesar 3.863 dengan nilai signifikan 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. berarti secara persial, sistem informasi e-PADI berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran PBB-P2.

Koefisien Determinan (R^2)

Tujuan koefisien determinan (R^2) adalah untuk menilai seberapa baik model dapat memperhitungkan varians dalam variabel dependen. Rentang nilai R^2 adalah 0 hingga 1. Variabel dependen sangat terbatas jika nilai R^2 rendah. Pemanfaatan sistem informasi e-PADI menyumbang 23,7% perbedaan variabel pembayaran PBB antara daerah pedesaan dan perkotaan, berdasarkan nilai R kuadrat sebesar 0.237 (23,7%). Sementara itu, faktor independen lain yang tidak termasuk dalam kajian ini berdampak pada 76,3% sisanya. Meskipun demikian, sistem informasi e-PADI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembayaran PBB baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, meskipun tidak dominan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi e-PADI terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan mengenai penerapan sistem informasi e-PADI di Bapenda Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa sistem ini secara keseluruhan berdampak positif terhadap proses pembayaran PBB P2. Penggunaan e-PADI memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta meningkatkan kepatuhan subjek pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan kajian ini sejalan dengan kajian Ardana Putri (2023) yang menemukan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak secara online memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan berdampak positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian lain (Lestari dkk, 2021), kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh metode pemungutan PBB-P2 secara online melalui e-Tax. Lebih lanjut, menurut penelitian Rusli (2020), penerapan aplikasi e-PBB telah membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah meskipun belum sepenuhnya berhasil.

Sistem informasi e-PADI berbasis digital menawarkan transparansi, efisiensi waktu, dan akses cepat ke prosedur pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan hipotesis Model Adopsi Teknologi (TAM) Davis (1989), yang menjelaskan bagaimana persepsi pengguna terhadap kesederhanaan dan keunggulan suatu teknologi dipengaruhi secara signifikan oleh adopsinya. Wajib pajak cenderung lebih patuh terhadap pembayaran pajak tepat waktu jika mereka yakin sistem e-PADI mudah digunakan dan menawarkan keunggulan dalam menghemat waktu.

Dengan mempertimbangkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa saran strategis. Pertama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan upaya berkelanjutan terhadap optimalisasi penerapan sistem informasi e-PADI sebagai sarana pembayaran pajak. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi informasi harus terus dijaga dan ditingkatkan agar wajib pajak semakin terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu sistem dan pembaruan berkala juga penting untuk dilakukan agar sistem tetap relevan.

Kedua, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait disarankan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik mengenai penggunaan e-PADI. Banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem ini dapat menghambat efektivitas penerapannya. Oleh karena itu strategi komunikasi dan sosialisasi sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi digital dan partisipasi wajib pajak.

Ketiga, masyarakat sebagai subjek pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memanfaatkan sistem informasi e-PADI sebagai sarana pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan. Manfaat pada sistem ini tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan digital ini menjadi langkah strategis dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan sistem informasi e-PADI dapat terus berkembang menjadi layanan publik yang semakin efektif dan transparan. Masyarakat diharapkan semakin sadar dan patuh dalam membayar pajak, sehingga penerimaan PBB-P2 dapat meningkat secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Anjelita, P., & Rosiska, E. (2019). *Rancang bangun sistem informasi e-learning pada SMK Negeri 3 Batam*.
- Cahya, R. (2016). Analisis penerimaan teknologi informasi menggunakan model TAM. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 101–110.

- Fahlevi, S. A., & Johannes, A. W. (2024). *Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Hibur, G. N., Fanggidae, R. P., Kurniawati, M., & Benu, Y. R. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) terhadap minat beli di Marketplace Facebook (studi pada generasi milenial di Kota Kupang). *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 12(2), 169–187.
- Jonny, S. (2020). *Dasar-dasar sistem informasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D., Nurhasanah, R., & Permana, Y. (2021). Pengaruh sistem informasi pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(1), 34–42.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(1), 22–39.
- Putri, A. (2023). Efektivitas sistem e-Pajak dalam meningkatkan penerimaan PBB. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 85–94.
- Putri, A. N. I. A. (2023). Pengaruh pembayaran sistem online terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(7), 3123–3132.
- Rohmah, A. P. N., & Zulaikha, Z. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Studi kasus Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Rusli, H. (2020). Analisis pengaruh aplikasi e-PBB terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 66–73.
- Setiawan, A. (2017). *Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model) dalam sistem informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Website Resmi Bapenda Kabupaten Deli Serdang. (n.d.). *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*. <https://bapenda.deliserdangkab.go.id>